



**PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

wonderful
indonesia



RENJA 2023

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KATA PENGANTAR

Seiring dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan evaluasi target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian Sasaran Rentra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini merupakan kerangka kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian upaya untuk mewujudkan perkembangan pariwisata, pemuda dan olahraga.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini, dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan.

Parit Malintang, 16 Juni 2022
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala



M. FADHLY S, AP. MM
Pembina Utama Muda/NIP. 19760130 199503 1 001



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Dengan demikian, Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 pada dasarnya adalah pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2021-2026, maka untuk penyusunan RKPD dan Renja OPD kita harus 1) RPJPN Tahun 2005-2025, 2) RPJMN Tahun 2021-2027, 3) RPJPD Propinsi Sumbar 2005-2025, 4) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025, 5) Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga, pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga serta pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Rancangan renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bapelitbangda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bapelitbangda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat;
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030;
 22. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2023 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalisis lingkungan strategis internal maupun eksternal.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah :

1. Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan
3. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, fungsi Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun rencana.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas,Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3. Telaahan Kajian Kementerian Terkait

3.4. Telaahan Kajian Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman pada Bab penjelasan dijelaskan juga bahwa perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020–2040 dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang yang bersifat umum dengan pendekatan :

Wilayah administratif kabupaten dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana polaruang.

Pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan kawasan peruntukan. Penetapan kawasan tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan ketentuan umum peraturan zonasi.

Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan ketentuan umum peraturan zonasi yang melengkapi rencana umum tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah disusun.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan

rencana tata ruang. Lebih lanjut izin pemanfaatan ruang dapat diatur dan diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi. Dalam Peraturan Daerah ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tataruang.

Sejalan dengan maksud tersebut maka pelaksanaan pembangunan di Padang Pariaman harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak

bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020 - 2040 yang telah disepakati ditambah lagi bahwa wilayah Padang pariaman adalah kawasan rawan bencana berupa bahaya bencana tsunami, gempa bumi, likuifaksi, longsor dan banjir. Untuk itu seluruh prgoram pembangunan seyogyanya memperhatikan ancaman bahaya-bahaya yang dimaksud.

Dalam penataan ruang, seluruh kawasan dan bangunan yang akan dan telah dibangun harus mengantisipasi agar ancaman bahaya tersebut bisadiminimalisir. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan mitigasi bencana terhadap segala jenis bencana yang potensial terjadi. Dengan demikian seluruh bangunan dan kawasan yang ada dan akan dibangun atau dikembangkan harus ramah terhadap segala ancaman bahaya tersebut.

3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip dari pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya

keberlanjutan penghidupan (livehood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengantisipasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga beserta indikator kinerjanya

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD

2.1.1. Gambaran Umum Kinerja OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 62 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan kabupaten di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada.

Pelaksanaan kegiatan Disparpora Tahun 2021 secara umum selaras dengan Renja Disparpora 2021. Pelaksanaan program dan kegiatan Disparpora Tahun 2021 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2021. Renja Disparpora pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Disparpora Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2021 dan perkiraan target dan capaian target 2021.

2.1.2. Perjanjian Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.

2.1.3. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2021

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan 3 (tiga) sub kegiatan, indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
 - Terlaksananya perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan kab/kota.
 - Terlaksananya penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera.
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Daerah Kab/Kota.
 - Terlaksananya peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota.

B. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan, indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadikan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota.

C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 5 (lima) kegiatan dengan 14 (empat belas) subkegiatan, indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga.
 - Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu.
 - Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat.
 - Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
 - Terlaksananya pemeliharaan / reabilitasasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

D. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan 2 (dua) subkegiatan, indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota.
 - Terlaksananya pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota.

E. Program Pemasaran Pariwisata

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) subkegiatan, indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten / Kota.
 - Terlaksananya penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten / kota, baik dalam dan luar negeri.

F. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) subkegiatan, indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif / Ruang Kreatif / Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten / Kota.
 - Terlaksananya pengembangan dan revitalisasi prasarana zona kreatif.

G. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) subkegiatan, indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

- Terlaksananya pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan / atau siswa).

H. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya pendataan potensi kepemudaan

I. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

- Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan.
- Terlaksananya pelaksanaan PASKIBRAKA.

J. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

K. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Program ini telah disusun dan dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi berupa senam bagi Aparatur Negara.
2. Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga.
3. Terlaksananya kegiatan persiapan dan keikutsertaan POPROV.

L. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
2. Terlaksananya kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

M. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan bahan promosi pariwisata.
2. Terlaksananya apresiasi seni dan pertunjukan.

N. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

2. Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK).
3. Operasional Penunjang DAK

O. Program Pengembangan Kemitraan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengembangan dan penguatan informasi dan database.
2. Terlaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata.
3. Pelayanan Kepariwisata (DAK).

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut: Total realisasi belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman dalam tahun anggaran 2021 tercatat sebesar Rp7.491.110.994,00. Jumlah tersebut mencapai 95,51% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.843.591.807,00 dimana realisasi seluruh komponen belanja daerah sudah hampir mencapai target kinerja yang ditetapkan. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp2.931.356.016,00 atau 98,50%, belanja barang dan jasa sebesar Rp3.609.754.978,00 atau 92,14% dan belanja hibah sebesar Rp950.000.000,00 atau 100% dari jumlah anggarannya.

Tabel 2.1
Capaian Evaluasi Program /Kegiatan 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
I.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	551.787.800	550.545.250	99,70
	<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader</i>	<i>401.787.800</i>	<i>400.545.250</i>	<i>83,14</i>
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	100.000.000	99.505.000	99,51
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	301.787.800	301.040.250	99,75
	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>150.000.000</i>	<i>150.000.000</i>	<i>100</i>
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	100
	2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.175.000.000	1.170.987.700	99,66
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>375.000.000</i>	<i>370.987.700</i>	<i>98,93</i>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	375.000.000	370.987.700	98,93
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>	<i>800.000.000</i>	<i>800.000.000</i>	<i>100</i>
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	800.000.000	800.000.000	100
II.	URUSAN PILIHAN			
	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.378.374.650	1.139.150.000	82,64
	<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>1.378.374.650</i>	<i>1.139.150.000</i>	<i>82,64</i>
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.333.374.650	1.094.510.000	82,09
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	45.000.000	44.640.000	99,20
	2. Program Pemasaran Pariwisata	10.000.000	9.350.000	93,50
	<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>10.000.000</i>	<i>9.350.000</i>	<i>93,50</i>
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	10.000.000	9.350.000	93,50

	3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	100.000.000	88.704.800	88,70
	<i>Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota</i>	100.000.000	88.704.800	88,70
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	100.000.000	88.704.800	88,70
	4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	862.578.000	826.950.400	95,87
	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	862.578.000	826.950.400	95,87
	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	862.578.000	826.950.400	95,87
	5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.765.851.357	3.579.531.210	95,05
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	69.306.000	68.936.000	99,47
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.480.000	58.340.000	99,76
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.826.000	10.596.000	97,88
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.973.950.157	2.930.156.016	98,53
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.865.590.157	2.827.726.016	98,68
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.360.000	102.430.000	94,53
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	142.458.700	136.821.000	96,04
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.267.700	8.267.700	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	4.680.000	93,60
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.995.000	4.303.200	86,15
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.196.000	119.570.100	96,28
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	453.316.500	443.618.194	97,86
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.884.500	30.884.500	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.232.000	22.133.694	70,87
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.200.000	390.600.000	99,85
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	126.820.000	125.900.634	99,28
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.900.000	118.010.634	99,25

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.260.000	4.260.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.660.000	3.630.000	99,18
		7.843.591.807	7.491.110.994	95,51

2.1.4. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2021

Seluruh realisasi belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 mencapai 98,10% dari yang dianggarkan. Realisasi belanja tiap program dan kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Anggaran sebesar Rp551.787.800,00 dan realisasi Rp550.545.250,00 atau 99,77% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota memiliki anggaran sebesar Rp401.787.800,00 dan realisasi Rp400.545.250,00 atau 99,69%. Kegiatan ini meliputi 2 (dua) sub kegiatan antara lain :

- Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan kab/kota memiliki anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp99.505.000,00 atau 99,51%. Kegiatan ini merupakan pembelian barang yang diserahkan kepada masyarakat. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
- Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera memiliki anggaran sebesar Rp301.787.800,00 dan realisasi Rp301.040.250,00 atau 99,75%. Kegiatan ini merupakan seleksi Siswa/Siswi SMA sederajat yang akan menjadi tim pengibar bendera pada upacara 17 Agustus baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan upacara pengibaran bendera dan penurunan bendera di halaman kantor Bupati Padang Pariaman. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota memiliki anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp150.000.000,00 atau 100%. Kegiatan ini meliputi 1 (satu) sub kegiatan antara lain :

- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota memiliki anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp150.000.000,00 atau 100%. Kegiatan ini merupakan pemberian dana Hibah kepada KNPI. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

B. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Anggaran sebesar Rp1.175.000.000,00 dan realisasi Rp1.170.978.700,00 atau 99,66% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota memiliki anggaran sebesar Rp375.000.000,00 dan realisasi Rp370.978.700,00 atau 98,93%. Kegiatan ini meliputi 1 (satu) sub kegiatan antara lain :

- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten / kota memiliki anggaran sebesar Rp375.000.000,00 dan realisasi Rp370.978.700,00 atau 98,93%. Kegiatan ini merupakan pemberian bantuan kepada masyarakat untuk menunjang kegiatan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat, agar menimbulkan minat olahraga bagi pemuda pemudi serta menciptakan atlet-atlet baru di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

2. Kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga memiliki anggaran sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi Rp800.000.000,00 atau 100%. Kegiatan ini meliputi 1 (satu) sub kegiatan antara lain :

- Pengembangan Organisasi Keolahragaan memiliki anggaran sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi Rp800.000.000,00 atau 100%. Kegiatan ini merupakan dana hibah yang diberikan kepada KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) yang dipergunakan untuk pembinaan kepada 36 Cabang Olahraga Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

C. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Anggaran sebesar Rp1.378.374.650,00 dan realisasi 1.139.150.000,00 atau 82,64% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten / kota memiliki anggaran sebesar 1.378.374.650,00 dan realisasi 1.139.150.000,00 atau 82,64%. Kegiatan ini meliputi 2 (dua) sub kegiatan antara lain :
 - Pengadaan / pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota memiliki anggaran sebesar Rp1.333.374.650,00 dan realisasi Rp1.094.510.000,00 atau 82,09%. Kegiatan ini merupakan pekerjaan fisik yang dilaksanakan di daerah objek wisata di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun pembangunan yang dilakukan adalah : Pembangunan Tempat Parkir Wisata Embung, Pembangunan Fasilitas Kebersihan (Pembuatan sampah sementara dan sanitasi) di Kecamatan Ulakan Tapakis, Pembangunan Toilet Wisata Kuliner Tiram dan Pembuatan Papan Interpretasi Kawasan Ekowisata Nyarai. Pembangunan yang dilakukan diharapkan bisa memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata serta dapat mendorong peningkatan pariwisata local yang dapat mempromosikan baik dalam maupun luar negeri. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
 - Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten / Kota memiliki anggaran sebesar Rp45.000.000,00 dan realisasi Rp44.640.000,00 atau 99,20%. Kegiatan ini merupakan penunjang pekerjaan fisik DAK tahun 2021 yang dilaksanakan di daerah objek wisata di Kabupaten Padang, berupa belanja operasional perencanaan dan pengawasan kegiatan DAK 2021.

D. Program Pemasaran Pariwisata

Anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.350.000,00 atau sebesar 93,50% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten / Kota memiliki anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan realisasi Rp9.350.000,00 atau 93,50%. Kegiatan ini meliputi 1 (satu) sub kegiatan antara lain :
 - Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten / Kota, baik dalam dan luar negeri memiliki anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan realisasi Rp9.350.000,00 atau 93,50%. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi tentang objek wisata yang ada di Padang Pariaman dalam bentuk data dan laporan.

E. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp88.704.800,00 atau sebesar 88,70% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyediaan prasarana (zona kreatif / ruang kreatif / kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah Kabupaten / Kota memiliki anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp88.704.800,00 atau 88,70%. Kegiatan ini meliputi 1 (satu) sub kegiatan antara lain :
 - Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif memiliki anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisas Rp88.704.800,00 atau 88,70%. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat berupa bantuan sarana dan prasarana dalam menunjang kreatifitas serta sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif pemuda di Kabupaten/Kota.

F. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Anggaran sebesar Rp862.578.000,00 dan realisasi sebesar Rp826.950.400,00 atau sebesar 95,87% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar memiliki anggaran sebesar Rp862.578.000,00 dan realisasi Rp826.950.400,00 atau 95,87%. Kegiatan ini meliputi 1 (satu) sub kegiatan antara lain :
 - Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan / atau siswa) memiliki anggaran sebesar Rp862.578.000,00 dan realisas Rp826.950.400,00 atau 95,87%. Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang pengembangan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) yang terlatih dan tersertifikasi dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan baik manca negara maupun lokal. Pelatihan yang telah dilakukan berupa pelatihan pemandu wisata outbond yang dilaksanakan di Mifan Padang Panjang tanggal 14 s.d 16 Juni 2021. Pelatihan Pemandu Balawisata (Lifeguard) dilaksanaka pada tanggal 8-10 Juli 2021 di Caroline Padang. Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata I yang dilaksanakan di Hotel Minang Jaya tanggal 9-11 Agustus 2021, pelatihan tata kelola destinasi pariwisata II diadakan pada tanggal 13-15 September 2021 di Hotel Minang Jaya, pelatihan pemandu wisata selam pada tanggal 15-20 November 2021 di Pulau Pasumpahan Padang, pelatihan mitigasi bencana yang telah dilaksanakan pada tanggal 10-12 November 2021 di Hotel Ibis Padang. Pelatihan pengelolaan desa wisata pada

tanggal 25-27 November 2021 di Hotel Grand Bunda Bukittinggi. Pelatihan manajemen home stay dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 2-4 Desember 2021 di Hotel Minang Jaya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM pada pemandu wisata yang ada di setiap wilayah kepariwisataan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

3.4. Hambatan Dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Berdasarkan data realisasi keuangan serta pencapaian target belanja SKPD tersebut diatas menunjukkan: Realisasi belanja secara keseluruhan sebesar Rp7.491.110.994,00. Jumlah tersebut mencapai 95,51% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.843.591.807,00 dimana realisasi seluruh komponen belanja daerah sudah hampir mencapai target kinerja yang ditetapkan. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp2.931.356.016,00 atau 98,50%, belanja barang dan jasa sebesar Rp3.609.754.978,00 atau 92,14% dan belanja hibah sebesar Rp950.000.000,00 atau 100% dari jumlah anggarannya. Hambatan /kendala dalam pencapaian target belanja tersebut adalah;

- 1) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai perencanaan;
- 2) Adanya wabah covid 19 yang menyebabkan tertundanya seluruh kegiatan
- 3) Adanya refocusing anggaran yang menyebabkan hilangnya beberapa kegiatan
- 4) Adanya pergeseran APBD Tahun 2021
- 5) Pengesahan Anggaran yang terjadi pada akhir Tahun 2021

2.1.5 Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Disparpora Tahun 2021

Untuk melihat Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Disparpora tahun 2021 dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Disparpora dan realisasi APBD dapat kita lihat secara lebih terperinci dalam tabel berikut:

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2022
KABUPATEN PADANG PADANG PARIAMAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.02.3.02.01.01.01	ran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran								
3.02.3.02.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
3.02.3.02.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Kali / Tahun	12 Kali / Tahun	12 Kali / Tahun	12 Kali / Tahun	100	12 Kali / Tahun	12 Kali / Tahun	100
3.02.3.02.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase pembayaran penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 Paket	1 Paket	100
3.02.3.02.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase kantor yang dibersihkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
3.02.3.02.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
3.02.3.02.01.01.01.17	Peyediaan Makanan dan Minuman	Peresentase penyediaan makanan dan minuman	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
3.02.3.02.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peresentase koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
3.02.3.02.01.01.01.19	Penyedia Jasa pendukung Administrasi Perkantoran	Peresentase jumlah honor yang dibayarkan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 Tahun	1 Tahun	100
3.02.3.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.02.3.02.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung terpelihara								
3.02.3.02.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase jumlah kendaraan terpelihara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
3.02.3.02.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan terpelihara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
3.02.3.02.01.01.02.07	Penggadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase jumlah perlengkapan yang dipenuhi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
3.02.3.02.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase jumlah peralatan yang dipenuhi	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100
3.02.3.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bintek								
3.02.3.02.01.01.05.03	Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang mengikuti Bintek	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100
3.02.3.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD								
3.02.3.02.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100	9 dokumen	9 dokumen	100
2.13.3.02.01.01.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor								
2.13.3.02.01.01.15.01	Pendataan potensi kepemudaan	Data Potensi kepemudaan se Kab. Padang Pariaman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	0	0	0
2.13.3.02.01.01.15.13	Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan	Jumlah Sarana dan Prasarana kepemudaan yang terenovasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	0	0
3.02.3.02.01.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan								
3.02.3.02.01.01.15.03	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Kerjasama dengan pihak ketiga pariwisata	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
3.02.3.02.01.01.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan	Promosi pariwisata dalam dan luar	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	diluar negeri	negeri								
3.02.3.02.01.01.15.09	Pengadaan Sarana dan Bahan Promosi Pariwisata	Promosi objek wisata alam kuliner dan religi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
3.02.3.02.01.01.15.11	Pemilihan Uni dan Ajo	Jumlah duta wisata Kab. Padang Pariaman	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	1 Keg	100
3.02.3.02.01.01.15.13	Apresiasi Seni dan Pertunjukan	Jumlah penampilan kesenian / ceremony	1	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
3.02.3.02.01.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi sesuai standar								
3.02.3.02.01.01.16.01	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Renovasi di objek wisata	2 OW	2 OW	2 OW	2 OW	100			
3.02.3.02.01.01.16.02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Pembangunan sarana dan prasarana objek wisata	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
3.02.3.02.01.01.16.03	Pengembangan Jenis & Paket Wisata Unggulan	Jumlah aktifitas penunjang wisata	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100			
3.02.3.02.01.01.16.06	Pengembangan daerah tujuan wisata	Partisipasi kegiatan Cipta Award	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100			
3.02.3.02.01.01.16.07	Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Pelaksanaan sosialisasi, penerapan serta pengawasan standarisasi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
3.02.3.02.01.01.16.13	Penataan Kawasan Pariwisata DAK Fisik	Pembangunan di objek wisata	1 OW	1 OW	1 OW	1 OW	100	1 OW	1 OW	100
3.02.3.02.01.01.16.14	Pembangunan sarana dan prasarana Wisata Tiram (Alokasi Dana Bntuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2018)	Pembangunan di objek wisata								
2.13.3.02.01.01.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor								
2.13.3.02.01.01.16.01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
2.13.3.02.01.01.16.11	Pelaksanaan PASKIBRAKA	Terlaksananya seleksi, pelatihan dan karyawan PASKIBRAKA	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	1 Keg	100
3.02.3.02.01.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi								
3.02.3.02.01.01.17.01	Pengembangan dan Penguatan Informasi Database	Penyusunan database pariwisata se Kab. Padang Pariaman	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
3.02.3.02.01.01.17.05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ekonomi kreatif	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.02.3.02.01.01.17.07	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Peningkatan SDM pariwisata	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
2.13.3.02.01.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi								
2.13.3.02.01.01.20.01	Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga	Prestasi olahraga pada pelajar	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
2.13.3.02.01.01.20.05	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Pelaksanaan senam kesegaran jasmani bagi ASN	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
2.13.3.02.01.01.20.10	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Prestasi olahraga pada pelajar SLB	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
2.13.3.02.01.01.20.11	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pelaksanaan Buru Babi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100			
2.13.3.02.01.01.20.23	Persiapan dan Keikutsertaan Porprov XV	Jumlah Atlet yang berprestasi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100			
2.13.3.02.01.01.20.24	Penyelenggaraan Porprov Sumbar XV Th 2018	Tuan rumah Penyelenggaraan Porprov XV tahun 2018	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100			
2.13.3.02.01.01.20.25	Pembukaan dan Penutupan Porprov XV Th 2018	Penyelenggaraan Ceremony pembukaan dan penutupan Porprov XV Tahun 2018	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100			
2.13.3.02.01.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga								
2.13.3.02.01.01.21.01	Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di masyarakat	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
2.13.3.02.01.01.21.02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Peralatan / perlengkapan pertandingan Porprov XV Tahun 2018	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
2.13.3.02.01.01.21.09	Pembangunan Sport Center Laga laga Nagari Parit Malintang (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2018)	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di masyarakat								

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Disparpora Kabupaten Padang Pariaman
Periode 2021 - 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	Realisasi 2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
13.1	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	357	360	367	365	370	375	380	385	IKS
13.2	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	18,51	37,03	18,86	46,29	55,55	64,81	74,07	83,33	
13.3	Persentase Wirausaha Muda	%	0,14	0,14	0,13	0,14	0,17	0,20	0,25	0,25	
13.4	Cakupan Pembinaan Olahraga	Kegiatan	36	36	36	36	38	39	40	41	
13.5	Jumlah Lapangan Olahraga	Jumlah	246	246	246	246	247	248	248	249	
B	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
2.	URUSAN PARIWISATA										
2.1	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Objek Wisata	4	4	4	5	5	6	6	6	
2.2	Jumlah Pelaku Pariwisata yang Tersertifikasi	Orang	41	41	72	45	50	55	60	60	
2.3	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	36	36	36	40	45	50	55	60	
2.4	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	208.872	250.000	152.207	265.000	275.000	300.000	330.000	350.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2021-2026 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Sumatera Barat yang strategis dengan pelabuhan laut di pantai barat Sumatera, mendorong Sumatera Barat berperan sebagai pintu gerbang barat Sumatera untuk melakukan ekspor komoditi ke negara-negara timur tengah dan Afrika sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan nasional.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Sumatera Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ditujukan untuk meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mewujudkan masyarakat sadar hukum dan keadilan, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kebijakan umum pembangunan daerah yang telah dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Namun komitmen ini perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki sehingga perlu disusun prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan ; a) isu-isu strategis memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan, b) potensi dan peluang yang dimiliki, dan c) hal-hal yang mendesak dan penting untuk dilaksanakan. Prioritas pembangunan tersebut bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Dalam penyusunan Renja Disparpora Tahun 2023 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Disparpora Tahun 2023 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

TABEL 3.1.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (P.3)	Peningkatan perekonomian masyarakat sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM (P.1)
	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital (P.4)	Peningkatan Ketepatan Alokasi Investasi dan Sumber-sumber Pendanaan (P.2)
	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan (P.5)	
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan (P.6)	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasiskan lingkungan dan tata ruang (P.3)
meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing (P.1)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing (P.4)
revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah (P.2)	Peningkatan Pengamalan ABS SBK dalam Kehidupan Bermasyarakat (P.7)
Memperkuat infrastruktur untuk	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023
mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	dan berkelanjutan (P.6)	prasarana publik yang berkelanjutan berbasis lingkungan dan tata ruang (P.3)
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan (P.6)	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasis lingkungan dan tata ruang (P.3)
		Peningkatan Kemandirian Masyarakat Tangguh Bencana (P.5)
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas (P.7)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis (P.6)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Rencana Kerja (Renja) Disparpora Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 tidak lepas dari pencapaian visi Bappeda Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Disparpora Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021 yakni “Terwujudnya pembinaan pemuda dan olahraga yang kreatif, cerdas, inovatif, berprestasi serta pariwisata yang berbudaya santun dan ramah lingkungan “.

TABEL 3.3.
KETERKAITAN ANTARA TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Padang Pariama Berjaya (unggul berkelanjutan religius, sejahtera dan berbudaya)	Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Meningkatnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten	Jumlah Kunjungan Wisatawan
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	Jumlah Pemuda berkarakter mandiri Jumlah Atlet Berprestasi	Meningkatnya Peran Pemuda Dan Olahraga Kabupaten	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif Persentase Atlet Berprestasi
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Evaluasi SAKIP Disparpora oleh Inspektorat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DISPATCH	Hasil Evaluasi SAKIP Disparpora oleh Inspektorat

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan				

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan SDM yang cerdas, sehat, beriman serta kreatifitas pemuda yang berkualitas
- 2) Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan
- 3) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan sistem penghargaan untuk atlit, pelatih dan official
- 5) Meningkatkan pemamfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan, kepdalam pembangunan
- 6) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda
- 7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penerapan nilai adat dan budaya
- 8) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya lokal
- 9) Meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi
- 10) Meningkatkan SDM dan kelembagaan pariwisata

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah, Secara umum, program dan kegiatan Disparpora Tahun 2022 adalah sebagaimana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 berikut:

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
2																	
2	19									5,077,200,000							3,036,481,017
2	19	02								1,500,000,000							413,613,700
2	19	02	2.01							1,350,000,000							413,613,700
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	Jumlah Pemuda Pelopor yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Berkarakter Mandiri	55.55 % 00,17 %	40 Orang	170 Orang	140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	55.55 % 00,17 %	15,000,000
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	Jumlah Wirausaha Muda yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Berkarakter Mandiri	55.55 % 00,17 %	40 Orang	170 Orang	165,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	55.55 % 00,17 %	15,000,000
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	Jumlah Pemuda Kader Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Berkarakter Mandiri	55.55 % 00,17 %	40 Orang	170 Orang	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	55.55 % 00,17 %	0
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Berkarakter Mandiri	55.55 % 00,17 %	40 Orang	170 Orang	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	55.55 % 00,17 %	0
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	Jumlah Sarana dan Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Jumlah Pemuda Berkarakter Mandiri	55.55 % 00,17 %	4 Unit	170 Orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	55.55 % 00,17 %	0

2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Jumlah Pemuda Berkarakter Mandiri	55,55 % 00,17 %	40 Orang	170 Orang	295,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	55,55 % 00,17 %	15,000,000
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Jumlah Pemuda Berkarakter Mandiri	55,55 % 00,17 %	34 Orang	170 Orang	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	55,55 % 00,17 %	368,613,700
2	19	02	2.02		Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						150,000,000					150,000,000
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemuda Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina	1 Dokumen	150,000,000
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						3,577,200,000					2,622,867,317
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1,842,200,000					602,867,317
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikat	370 Orang	370 Orang	370 Orang	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikat	370 Orang	0
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikat		30 Unit	100 Orang	1,742,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikat	30 Unit	602,867,317
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						895,000,000					1,350,000,000

2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga yang mewakili daerah ke tingkat provinsi	370 Orang	1 Dokumen	5 Cabang Olahraga	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Cabang Olahraga yang mewakili daerah ke tingkat provinsi	370 Orang	300,000,000
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga yang mewakili daerah ke tingkat provinsi	370 Orang	5 Dokumen	5 Cabang Olahraga	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Cabang Olahraga yang mewakili daerah ke tingkat provinsi	370 Orang	550,000,000
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabang Olahraga yang mewakili daerah ke tingkat provinsi	370 Orang	800 Orang	5 Cabang Olahraga	660,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Cabang Olahraga yang mewakili daerah ke tingkat provinsi	370 Orang	500,000,000
2	19	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								80,000,000				270,000,000
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Jumlah pengembangan atlet dibina di daerah dan provinsi termasuk kebutuhan khusus	370 Orang	150 Orang	5 Cabang Olahraga	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	250,000,000
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Jumlah pengembangan atlet dibina di daerah dan provinsi termasuk kebutuhan khusus	370 Orang	600 Orang	5 Cabang Olahraga	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	0
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah pengembangan atlet dibina di daerah dan provinsi termasuk kebutuhan khusus	370 Orang	3 Dokumen	5 Cabang Olahraga	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	20,000,000
2	19	03	2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								700,000,000				50,000,000
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga yang berprestasi	370 Orang	2 Organisasi	38 Cabang Olahraga	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	0

2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Olahraga yang berprestasi	370 Orang	1 Dokumen	38 Cabang Olahraga	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	50,000,000		
2	19	03	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								60,000,000					350,000,000	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pengembangan olahraga masyarakat	370 Orang	1 Dokumen	6 Kegiatan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	100,000,000		
2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pengembangan olahraga masyarakat	370 Orang	1 Laporan	6 Kegiatan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	50,000		
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Jumlah Pengembangan olahraga masyarakat	370 Orang	2 Dokumen	6 Kegiatan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	200,000		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										8,582,230,427				7,757,617,469		
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												4,278,035,577			4,056,075,568
3	26	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											102,331,770			106,345,520
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja OPD yang tersusun	BB Huruf	6 Dokumen	11 Dokumen	78,170,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	80,480,000		
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja OPD yang tersusun	BB Huruf	5 Laporan	11 Dokumen	24,161,010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	25,865,520		
3	26	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,139,738,186			3,151,058,186

3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ersentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BB Huruf	14 Orang/bulan	100 %	3,035,978,186	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	3,035,978,186
3	26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BB Huruf	12 Dokumen	100 %	103,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	115,080,000
3	26	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								11,660,000			10,000,000	
3	26	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	BB Huruf	15 Orang	100 %	11,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	10,000,000
3	26	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								225,313,350			141,493,740	
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	BB Huruf	12 Paket	100 %	9,423,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	9,500,000
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	BB Huruf	15 Paket	100 %	20,184,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	8,267,700
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	BB Huruf	2 Dokumen	100 %	3,500,000		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	3,000,000
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	BB Huruf	6 Laporan	100 %	9,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	5,650,000
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	BB Huruf	30 Laporan	100 %	182,216,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	115,076,040
3	26	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								97,760,000			25,000,000	

3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	BB Huruf	5 Unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	5,000,000
3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	BB Huruf	5 Unit	100 %	68,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	15,000,000
3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	BB Huruf	2 Unit	100 %	8,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	5,000,000
3	26	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								522,700,770				509,012,074
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BB Huruf	35 Laporan	100 %	19,998,270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	26,365,900
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BB Huruf	12 Laporan	100 %	43,102,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	22,133,694
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BB Huruf	20 Laporan	100 %	459,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	460,512,480
3	26	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								178,531,501				113,166,048
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	BB Huruf	6 Unit	100 %	149,571,501	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	100,166,048
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	BB Huruf	1 Unit	100 %	13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	5,000,000

3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	BB Huruf	10 Unit	100 %	7,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	5,000,000	
3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	BB Huruf	5 Unit	100 %	7,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	3,000,000	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									2,500,000,000					1,865,000,000	
3	26	02	2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									431,500,000					1,750,000,000
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	5 DTW	1 Dokumen	2 DTW	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	5 DTW	250,000,000	
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	5 DTW	2 DTW	2 DTW	401,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	5 DTW	1,500,000,000	
3	26	02	2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									1,383,500,000					80,000,000
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikembangkan	5 DTW	5 Unit	6 Kawasan	1,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	5 DTW	50,000,000	
3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikembangkan	5 DTW	1 Dokumen	6 Kawasan	83,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	5 DTW	30,000,000	
3	26	02	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									665,000,000					0

3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	5 DTW	0 Lokasi	7 DTW	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	5 DTW	0
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	5 DTW	8 Unit	7 DTW	665,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	5 DTW	0
3	26	02	2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota								20,000,000			35,000,000	
3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah TDUP yang diterbitkan	5 DTW	1 Laporan	1 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	5 DTW	20,000,000
3	26	02	2.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Jumlah TDUP yang diterbitkan	5 DTW	1 Unit Usaha	1 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	5 DTW	15,000,000
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								419,999,850			926,541,901		
3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								419,999,850			926,541,901	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan	275000 Orang	3 Dokumen	275000 Orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kunjungan Wisatawan	275000 Orang	350,000,000
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan	275000 Orang	3 Laporan	275000 Orang	370,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kunjungan Wisatawan	275000 Orang	476,541,901

3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan	275000 Orang	1 Dokumen	275000 Orang	49,999,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kunjungan Wisatawan	275000 Orang	100,000,000	
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									200,000,000				0	
3	26	04	2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif									200,000,000				0
3	26	04	2.02	04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Penyediaan Data yang tersedia	Jumlah Bantuan untuk Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Unit	5 Unit	5 Unit	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Unit	0	
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									1,184,195,000				910,000,000	
3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar									814,195,000				660,000,000
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Jumlah Pelaku Pariwisata Yang Tersertifikasi	280 Orang	280 Orang	280 Orang	599,195,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	280 Orang	600,000,000	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pelaku Pariwisata Yang Tersertifikasi	280 Orang	50 Orang	280 Orang	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	280 Orang	0	
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Pariwisata Yang Tersertifikasi	280 Orang	1 Dokumen	280 Orang	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	280 Orang	60,000,000	
3	26	05	2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif									370,000,000				250,000,000
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pelaku Ekonomi Kreatif yang di latih	50 Orang 45 Orang	600 Orang	45 Orang	370,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	50 Orang 45 Orang	250,000,000	
TOTAL											13,659,430,427				10,794,098,486		

BAB IV PENUTUP

Renja Disparpora Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program- program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Disparpora Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan jika anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Disparpora Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Disparpora Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan OPD dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Disparpora Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh ASN Disparpora Kabupaten Padang Pariaman dan diiringi peran aktif stakeholder Kabupaten Padang Pariaman. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Parit Malintang, 16 Juni 2022
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala



M. FADHLY S, AP. MM
Pembina Utama Muda/NIP. 19760130 199503 1 001